BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberikan kekuasaannya untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Pada umumnya, pemerintah dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Sebagai negara berkembang, Indonesia dituntut untuk terus mengalami kemajuan, terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi, teknologi, infrastruktur, dan kesehatan. Kemajuan ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan mereka setiap tahunnya dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan ini harus disusun dengan kualitas yang baik, baik dari segi informasi maupun penulisannya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kualitas informasi yang dimuat dalam laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah harus memenuhi kriteria nilai informasi menurut peraturan perundang-undangan serta prinsip yang berlaku. Laporan keuangan yang diserahkan memerlukan pemantauan dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berupaya menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan melalui penyajian laporan pertanggungjawaban (Darwis & Meliana, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola keuangan mereka secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel (Sarnani & Dewi, 2022).

Informasi akuntansi merupakan jenis informasi kuantitatif, dan juga merupakan hasil dari sistem informasi akuntansi yang berorientasi keuangan yang dikatakan dalam satuan moneter. Sedangkan kualitas informasi adalah ukuran subjektif dari kebutuhan, objektivitas, dan integritas data yang dikumpulkan. Pengguna membutuhkan informasi yang berkualitas dengan karakteristik yang berharga. Kualitas informasi merupakan konsep yang berkaitan dengan kualitas hasil sistem informasi, bermanfaat bagi pelaku bisnis, terkait dengan pengambilan keputusan, mudah dipahami karena hasilnya memenuhi kebutuhan pengguna (Darma & Sagala, 2020).

Laporan keuangan merupakan media suatu entitas, dalam hal ini pemerintah daerah harus melaporkan kepada publik tentang kinerja keuangannya. Pemerintah daerah harus dapat menyampaikan laporan dengan informasi yang berkualitas. Suatu pemerintahan memerlukan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten untuk mendapatkan laporan pemerintahan yang berkualitas. Sehingga laporan yang dihasilkan selesai dan disampaikan tepat waktu. Semakin

cepat laporan keuangan disajikan, semakin baik keputusannya (Fathurrahman & Suwarno, 2019).

Faktanya di dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan data yang tidak sesuai dan tidak mengikuti prinsip akuntansi yang ditetapkan pada umumnya. Banyak laporan keuangan yang masih mendapatkan temuan karena dalam penyajiannya belum sesuai dengan standar yang diterapkan dan belum memenuhi kelengkapan yang telah ditentukan (Purwanti, 2020).

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, banyak laporan keuangan daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi masih terdapat kecurangan yang terjadi dalam pemerintahan, seperti korupsi dan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Masih banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Banyak kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah yang setelah mendapat WTP merasa itu sudah cukup, padahal opini WTP bukanlah tujuan akhir. Jika laporan keuangan kementerian atau pemerintah daerah meraih opini WTP, mereka harus mengevaluasi kembali catatan-catatan dari BPK yang bisa dimaksimalkan untuk efisiensi anggaran. Evaluasi ini bisa mengacu pada aspek perencanaan kegiatan hingga pengambilan keputusan terutama dalam laporan keuangan harus dipakai sebagai alat untuk *feed back* membuat perencanaan yang lebih baik.

Dilansir dari aceh.bpk.go.id (2023) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022, meskipun pemerintah kota tersebut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK menemukan sejumlah permasalahan

yang menunjukkan adanya kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa masalah yang teridentifikasi adalah perencanaan anggaran yang tidak realistis, pembayaran honorarium yang tidak sesuai ketentuan, dan kekurangan volume pekerjaan pada beberapa paket kegiatan belanja modal yang mengakibatkan kelebihan pembayaran. Meskipun masalah-masalah tersebut tidak secara material mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, hal ini menandakan adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Fenomena ini mencerminkan pentingnya penerapan prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Prinsip *Good Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pengendalian yang efektif dapat berpengaruh besar terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah, kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam laporan BPK mengindikasikan bahwa meskipun opini WTP diberikan, tata kelola keuangan daerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *Good Governance* yang ideal.

Selain faktor *Good Governance*, faktor internal institusional, seperti sistem pengelolaan anggaran, pengawasan internal, dan kapasitas sumber daya manusia, juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Masalah perencanaan anggaran yang tidak realistis dan kekurangan volume pekerjaan pada proyek belanja modal dapat menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan dan pengawasan internal yang efektif. Dengan demikian, faktor-faktor internal ini perlu diperhatikan dalam upaya

meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang disajikan oleh OPD kota Lhokseumawe.

Good Governance merupakan wujud dari penerimaan akan penting suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan public (Nikodimus, 2021). Penerapan prinsip *Good Governance* berperan penting dalam menghasilkan kegiatan pemerintahan yang bersih dan baik, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas laporan keuangan di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian (Hosana *et al*., 2021) *Good Governance* berpengaruh langsung dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas serta menjaga hubungan yang baik dengan stakeholders yang ada. Penerapan prinsip *Good Governance* juga terbukti memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, seperti yang ditemukan dalam penelitian Azlim *et al*, (2012) yang meneliti pengaruh *Good Governance* terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun, seperti yang diungkapkan (Handayani, 2012). Kualitas laporan keuangan pemerintah seringkali dipengaruhi oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam tata kelola keuangan, yang masih perlu ditingkatkan agar tercapai tata kelola yang lebih baik (Masitoh, *et al*, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Setiyawati & Doktoralina, 2019), (Dharma *et al*., 2023) dan (Sukmawati, 2023) dalam penelitiannya tentang prinsip *Good Governance* menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif terhadap kualitas

informasi akuntansi dengan variabel pemanfaatan teknologi informasi dan prinsip *Good Governance*. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Setiyawati & Doktoralina (2019). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu peneliti akan menambahkan faktor internal institusional sebagai variabel independen dari penelitian (Winarni & Akbar, 2020).

Selain penerapan prinsip *Good Governance*, faktor internal institusional juga memegang peranan penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Faktor-faktor ini mencakup sistem pengelolaan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan pengawasan internal yang ada di pemerintahan daerah. Sistem pengelolaan anggaran yang baik akan memastikan bahwa anggaran yang disusun realistis dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih akan mendukung pengelolaan keuangan yang akurat dan tepat waktu (Baturante *et al*., 2018). Pengawasan internal yang efektif juga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dan penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku (Gazali *et al*., 2024). Faktor internal institusional dipengaruhi oleh tekanan yang bersifat koersif dan normatif. Tekanan koersif biasanya berasal dari peraturan atau kewajiban yang harus dipatuhi oleh organisasi, sedangkan tekanan normatif berkaitan dengan standar atau norma profesional yang berlaku. Faktor ini mencakup variabel seperti tanggung jawab manajemen dan kualitas sumber daya manusia, yang secara langsung dapat memengaruhi kualitas informasi akuntansi. Komitmen manajemen menjadi elemen penting dalam memanfaatkan peluang untuk memastikan keberhasilan

pelaksanaan kebijakan dan perubahan dalam organisasi. Dengan komitmen yang tinggi, manajemen dapat mendorong pengelolaan akuntansi yang lebih baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku (Winarni & Akbar, 2020).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Winarni & Akbar, 2020) dan (Dharma *et al*., 2023) menyatakan bahwa faktor internal institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi pemerintah. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati (2023) dan (Indrasti *et al*., 2020) menyatakan bahwa faktor internal isntitusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi pemerintah.

Berdasarkan fenomena, Meskipun banyak laporan keuangan pemerintah daerah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berbagai temuan menunjukkan kelemahan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti perencanaan anggaran yang tidak realistis, kekurangan volume pekerjaan, hingga pembayaran yang tidak sesuai aturan. Hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian WTP belum sepenuhnya mencerminkan tata kelola yang baik (*Good Governance*) dan kualitas informasi akuntansi yang ideal.

Selain itu, faktor internal institusional seperti sistem pengelolaan anggaran, pengawasan internal, dan kapasitas sumber daya manusia juga memengaruhi kualitas laporan keuangan. Kota Lhokseumawe menjadi salah satu contoh daerah yang meskipun mendapatkan opini WTP, masih menghadapi kelemahan pengelolaan keuangan sebagaimana ditemukan dalam laporan BPK. Kesenjangan ini menggarisbawahi perlunya penelitian untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan prinsip *Good Governance* dan faktor internal institusional

memengaruhi kualitas informasi akuntansi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Lhokseumawe. Penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi pada upaya meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, khususnya di Kota Lhokseumawe. Dari fenomena serta permasalahan serta adanya ketidaksesuaian hasil yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini namun dengan objek yang lebih terkhusus dari penelitian sebelumnya yakni di OPD Kota Lhokseumawe. Sehingga peneliti mengambil judul "**Pengaruh Prinsip *Good Governance* Dan Faktor Internal Institusional Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi (Studi Kasus Opd Kota Lhokseumawe)**".

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, terdapatnya rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Prinsip *Good Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Pada OPD Kota Lhokseumawe?
2. Apakah Faktor Internal Institusional berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Pada OPD Kota Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah adanya rumusan masalah dalam penelitian maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui bahwa Prinsip *Good Governance* memiliki pengaruh terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Pada OPD Kota Lhokseumawe.

2. Dapat mengetahui bahwa Faktor Internal Institusional memiliki pengaruh terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Pada OPD Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang bagaimana pengaruh *Good Governance*, dan Faktor Internal Institusional terhadap Kualitas Informasi Akuntansi pada OPD Kota Lhokseumawe. Selain itu, penelitian ini digunakan sebagai salah satu pemenuhan syarat dalam menyelesaikan studi guna mendapatkan gelar sarjana.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan penilaian dan informasi OPD Kota Lhokseumawe dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, serta diharapkan dapat menghindari keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang dapat menimbulkan akibat buruk bagi OPD Kota Lhokseumawe.